



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASEP MUJTAHID
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 13973

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **812.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/36 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/162 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 630 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJAR , WARISAN Rp. 55.000.000
4. Tanah Seluas 980 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, WARISAN Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, WARISAN Rp. 17.000.000
6. Tanah Seluas 2835 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, WARISAN Rp. 19.000.000
7. Tanah Seluas 1400 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, WARISAN Rp. 16.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **132.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA SEDAN Tahun 1975, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000



4. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000
5. MOTOR, SCOOPY PRESTIGE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.922.455

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 973.422.455

III. HUTANG Rp. 169.829.400

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 803.593.055

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.